BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak dikenalnya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia, konsep ini semakin lazim digunakan. Keadaan tersebut terjadi setelah krisis yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia yang telah menghancurkan berbagai sektor perekonomian. Lemahnya implementasi tata kelola perusahaan adalah salah satu penyebab krisis. Maka dari itu penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) penting untuk dilakukan, karena dapat berkontribusi mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan para investor, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Sejak saat itu, pemerintah dan investor mulai memberikan perhatian pada penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia (Wikrami dan Astika, 2016).

Governance merupakan suatu sistem, dan yang mengoperasikan sistem tersebut tentu saja adalah manusia, adapun kesuksesan penerapannya sangat bergantung pada integritas dan komitmen (Mahadewi dan Putri, 2019). Pendekatan yang berbeda-beda diperlukan dalam menerapkan *governance* yang baik, disesuaikan dengan keadaan dan waktu. Pendekatan yang dilakukan ada dua cara yaitu pendekatan aturan (*Hard Law*) dan pendekatan etika (*Soft Law*). Indonesia masih menganut pendekatan etika yang lembut, meski ditengah realitasnya masih terdapat perilaku kecurangan yang berlebihan.

Gambar 1. 1 Sebaran Fraud Pekerja

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, dalam laporan 2020 *Global Study on Occupational Fraud and Abuse* mengemukakan bahwa dari 125 negara, kecurangan yang berasal dari divisi Akuntansi adalah sebesar 14%. Hal ini harus menjadi catatan penting karena *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* mengungkapkan bahwa salah satu komponen tata kelola perusahaan yang baik adalah adanya sistem pelaporan keuangan yang memadai.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) juga mengungkapkan dalam laporan survai fraud Indonesia 2016, bahwa penyelesaian fraud dilakukan melalui proses hukum pidana. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui KPK yang menghukum pidana setiap pihak yang terbukti melakukan tindak fraud, khususnya korupsi. Namun, agaknya perlu dipertegas untuk penyelesaian tindak pidana guna menekan angka terjadinya fraud yang ada di Indonesia (*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, 2017).

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan telah terjadi berbagai penyimpangan dalam beretika sehingga menyebabkan adanya inflasi global yang terjadi di Indonesia. Laporan keuangan yang diajukan oleh akuntan dapat menyimpang dari etika yang semestinya, oleh karena itu untuk memperbaiki keadaan tersebut perlu ditanamkan mentalitas pengusulan yang baik dan tidak menyimpang dari etika laporan keuangan pada calon akuntan. Bila keadaan ini terus saja terjadi maka ada kemungkinan akan terjadi kurang percayaannya kepada profesi akuntan di kemudian harinya (Yuliana dkk, 2016). Pendidikan etika pada masa ini harus lebih digalakkan lagi di Indonesia mengingat akan terjadinya pasar global, yang jika tingkat kepercayaan kepada akuntan dalam negara ini melemah dan akan kalah dengan para akuntan negara luar yang akan memasuki Indonesia.

Menurut penelitian Lupita Ruth Laurensia Paath Mardatillah (2017) dinyatakan bahwa beberapa pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan internal, maupun akuntan pemerintah seharusnya tidak akan pernah terjadi apabila setiap akuntan dan calon akuntan, yaitu mahasiswa, memiliki pengetahuan, pemahaman, dan dapat menerapkan etika

secara memadai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan yang profesional.

Dunia pendidikan akuntansi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku etis calon akuntan, yaitu mahasiswa akuntansi. Dan dalam perkembangan profesi akuntansi di Indonesia keberadaan pendidikan etika mempunyai peranan yang sangat penting (Jusvitasari, 2020). Pada saat ini pendidikan moral di Indonesia harus lebih diperkuat. Dalam penyajian laporan keuangan juga harus sesuai dengan etika yang tepat untuk mengurangi risiko penyalahgunaan laporan keuangan. Karena lulusan yang beretika dan bermoral tinggi adalah tujuan utama dari pendidikan akuntansi di Indonesia (Anwar dan Amarullah, 2005).

Bahkan Arfan Lubis (2009) dalam bukunya menyebutkan bahwa etika akuntan telah menjadi isu yang menarik. Runtuhnya beberapa perusahaan dan kecurangan yang semakin tinggi dalam dua dekade terakhir semakin mempertanyakan integritas profesi akuntan. Skandal seperti Enron dengan KAP Arthur Andersen ditahun 2001 menguak fakta bahwa Enron merupakan satu dari tujuh perusahaan di Amerika yang memiliki permasalahan mengenai krisis etis profesi dalam bidang akuntansi (McLean, 2001). Diikuti WorldCom yang telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan dengan cara menggelembungkan pendapatan, yang mengakibatkan harga saham menjadi tinggi sekali, jauh di atas harga yang sebenarnya, dan dana yang berjumlah USD 3,9 miliar yang seharusnya dibukukan sebagai pengeluaran, justru oleh auditor yang ditunjuk WorldCom dibukukan sebagai pendapatan, adalah KAP Arthur Andersen yang berada di balik manipulasi laporan keuangan Worldcom.

Kasus jatuh bangkrut Lehman Brothers, perusahaan sekuritas paling dikagumi versi Majalah Fortune, karena memanipulasi pos pinjaman sebesar USD 50 miliar sebagai pos penjualan. Padahal pada tahun 2008, laporan keuangannya diaudit oleh EY, salah satu dari empat raksasa kantor audit dunia. Krisis skandal akuntansi juga melanda usaha Toshiba pada tahun 2015, Toshiba terbukti melakukan kebohongan melalui *accounting fraud* senilai USD 1.22 milyar. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai upaya sehingga menghasilkan laba yang tidak sesuai dengan realita (Integrity-indonesia.com, 2017).

Kasus-kasus manajemen laba tersebut memberikan kesadaran tentang pentingnya menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan bermoral dalam dunia pendidikan. Manajemen laba seharusnya tidak boleh dilakukan karena dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang salah. Dengan adanya manajemen laba informasi yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan perusahaan sesungguhnya. Namun untuk memanfaatkan fleksibilitas dalam ketentuan untuk pelaporan keuangan, manajemen laba dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan tindakan rasional.

Manajemen laba didefinisikan oleh Scott (2003) sebagai suatu pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer untuk mencapai tujuan tertentu. Kebutuhan dari pengguna laporan keuangan belum tentu sejalan dengan tujuan dari manajer perusahaan ini. Tujuan dari manajer perusahaan telah banyak dilakukan penelitiannya, misalnya penelitian oleh Healy, P; Wahlen (1999) yang menyatakan bahwa tujuan dilakukannya manajemen laba adalah untuk menyembunyikan kondisi perusahaan yang sesungguhnya dari *stakeholder* dan pemegang saham atau dapat pula dilakukan untuk mempengaruhi perjanjian atau kontrak yang dibuat berdasarkan informasi laporan keuangan.

Sosialisasi etika profesi akuntan menurut Ponemon, L dan Glazer (1990) bahwa pada kenyataannya berawal dari masa kuliah, dimana mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dituntut untuk bisa menghasilkan perilaku baik dalam etika penyusunan laporan keuangan. Di luar negeri berbagai penelitian telah dilakukan mengenai perilaku (*behavior*) perbedaan mahasiswa akuntansi dan persepsi mereka mengenai etika profesi akuntan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Jeffrey (1993) menyimpulkan bahwa mahasiswa tingkat atas memiliki rata-rata DIT yang lebih tinggi (memiliki moral yang lebih baik) dibandingkan mahasiswa tingkat bawah, penelitian ini menggunakan *Defining Issues Test* (DIT) dalam mengukur pendidikan moral mahasiswa. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Clikeman, P.M dan Henning (2000) yang dilakukan di salah satu universitas di Amerika tentang sosialisasi kode etik profesi menyangkut manajemen laba pada mahasiswa akuntansi dan menyimpulkan bahwa mahasiswa akuntansi lebih tidak menyetujui manajemen laba pada akhir kuliah mereka dibandingkan pada awal kuliah.

Perilaku etis pun dibutuhkan dalam bidang profesi sehingga tidak hanya kemampuan dan keahlian khusus (*skill*) yang dibutuhkan. Perilaku yang sesuai dengan norma, aturan, dan hukum yang ditetapkan adalah perilaku etis. Meskipun setiap mahasiswa telah diberikan pendidikan etika dengan porsi yang sama namun mereka mempunyai persepsi moral, penilaian, dan perilaku yang berbeda-beda (Smith, 2009). Untuk menilai dan menalar permasalahan yang berkenaan dengan isu-isu moral yang mereka hadapi, masing-masing individu memiliki ideologi etis yang mereka gunakan sendiri (Forsyth, 1980).

Serangkaian prinsip dasar yang digunakan untuk memulai penyusunan laporan keuangan merupakan etika penyusunan laporan keuangan. Etika penyusunan laporan keuangan memiliki karakteristik yang dikelompokkan kedalam empat katagori yaitu: salah saji, pengungkapan, biaya dan manfaat, serta tanggung jawab. Bagi manajer dan akuntan dalam mengambil suatu keputusan maka pemahaman etika dalam penyusunan laporan keuangan sangat diperlukan, dimana pemahaman didapat dari proses pembelajaran pendidikan formal (Bayusena, Suartana dan Badera, 2016).

Salah saji adalah kecenderungan melakukan kesalahan dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan, contohnya kesalahan dalam pencatatan akuntansi dapat menyebabkan salah saji material pada pelaporan keuangan. Kecenderungan dalam mengungkapkan informasi laporan keuangan adalah faktor pengungkapan sehingga informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian ekonomi yang sebenarnya. Persepsi tentang beban perusahaan di dalam melakukan pengungkapan adalah faktor biaya dan manfaat. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya dalam membuat keputusan merupakan manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi yang sebenarnya dari laporan keuangan. Persepsi tentang tanggung jawab manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang memberikan sumber informatif bagi penggunanya adalah faktor terakhir yaitu tanggung jawab. Untuk mengukur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada para investor dan para pemilik dari perusahaan itu sendiri maka prinsip tanggung jawab ini perlu menekankan pada adanya sistem yang jelas.

Fenomena perbedaan persepsi mengenai manajemen laba diuraikan oleh Bayusena, dkk (2016) bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa Maksi dan PPAk mengenai manajemen laba dalam etika penyusunan laporan keuangan. Sedangkan penelitian Ajward (2015) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi etika mengenai manajemen laba sesuai dengan sifat, arah, materialitas dan niat manipulasi laba yang terlibat.

Sedangkan fenomena kedua mengenai salah saji diuraikan oleh Yana, dkk (2016) bahwa tidak ada perbedaan persepsi antara akuntan dan mahasiswa terhadap etika penyusunan laporan keuangan tentang salah saji laporan keuangan. Sebaliknya penelitian dari Lasim (2017) menunjukkan bahwa adanya perbedaan persepsi mengenai salah saji yang tidak signifikan antara mahasiswa yang belum menempuh dan sudah menempuh mata kuliah etika bisnis profesi dan auditing.

Fenomena ketiga mengenai pengungkapan informasi diuraikan oleh Bayusena, dkk (2016) bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa Maksi dan PPAk mengenai pengungkapan dalam etika penyusunan laporan keuangan. Penelitian dari Lasim (2017) juga menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan mengenai pengungkapan informasi dalam etika penyusunan laporan keuangan antara mahasiswa yang belum dan sudah menempuh mata kuliah etika bisnis profesi dan auditing. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Yana, dkk (2016) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara akuntan dan mahasiswa tentang pengungkapan informasi yang sensitif.

Lasim (2017) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan mengenai biaya dan manfaat antara mahasiswa yang belum dan sudah menempuh mata kuliah etika bisnis profesi dan auditing. Sedangkan penelitian dari Alkatiri, dkk (2016) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai biaya dan manfaat dalam laporan keuangan antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen.

Setyaningrum (2018) menyatakan tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab antara mahasiswa semester atas dan semester bawah terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Sedangkan penelitian dari Bayusena, dkk (2016) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa Maksi dan PPAk mengenai tanggung jawab dalam etika penyusunan laporan keuangan.

Dzakirin (2013) mengungkapkan bahwa menyatakan tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai isu-isu etika dalam dunia akuntansi antara mahasiswi dan mahasiswa akuntansi. Sedangkan penelitian Budiati (2019) menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai dampak skandal akuntansi dan bisnis terhadap etika dan profesi Akuntansi antara mahasiswa akuntansi program sarjana dan program pascasarjana. Disebutkan juga dalam penelitian McCann et al., (2015) bahwa mahasiswa setuju jika skandal akuntansi telah menekankan pentingnya perilaku etis yang baik dalam profesi akuntansi.

Motivasi dari penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan persepsi manajemen laba, salah saji, pengungkapan, biaya dan manfaat, serta tanggung jawab dalam etika penyusunan laporan keuangan dan efek skandal akuntansi terhadap mahasiswa akuntansi tingkat bawah dan tingkat atas. Dua kelompok sampel ini dipilih dengan alasan untuk melihat apakah mahasiswa yang belum mempelajari etika bisnis dan pengauditan 1 dengan mahasiswa yang sudah mempelajari etika bisnis dan pengauditan 1 akan memiliki persepsi yang sama atau berbeda terkait etika penyusunan laporan keuangan ketika dihadapkan dalam situasi yang memiliki isu moral atau skandal di dalam bidang akuntansi. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi kepada kalangan akademisi mengenai kadar etika mahasiswa jurusan akuntansi untuk dijadikan dasar gambaran sementara terhadap masa depan akuntan di Indonesia.

Atas dasar uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diberi judul **“Persepsi Mahasiswa Program Studi Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan Dan Efek Skandal Akuntansi”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan persepsi mengenai manajemen laba antara mahasiswa akuntansi tingkat bawah dengan akuntansi tingkat atas.
2. Apakah ada perbedaan persepsi mengenai salah saji dalam laporan keuangan antara mahasiswa akuntansi tingkat bawah dengan akuntansi tingkat atas.

3. Apakah ada perbedaan persepsi mengenai pengungkapan informasi yang sensitif antara mahasiswa akuntansi tingkat bawah dengan akuntansi tingkat atas.
4. Apakah ada perbedaan persepsi mengenai biaya manfaat pengungkapan informasi antara mahasiswa akuntansi tingkat bawah dengan akuntansi tingkat atas.
5. Apakah ada perbedaan persepsi mengenai pertanggungjawaban terhadap pengguna laporan keuangan antara mahasiswa akuntansi tingkat bawah dengan akuntansi tingkat atas.
6. Apakah ada perbedaan persepsi etika menyangkut dampak skandal akuntansi dan bisnis antara mahasiswa akuntansi tingkat bawah dengan akuntansi tingkat atas.

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah ditentukan dalam rumusan masalah penelitian di atas maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Perbedaan persepsi mengenai manajemen laba antara mahasiswa akuntansi tingkat bawah dengan akuntansi tingkat atas.
2. Perbedaan persepsi mengenai salah saji dalam laporan keuangan antara mahasiswa akuntansi tingkat bawah dengan akuntansi tingkat atas.
3. Perbedaan persepsi mengenai pengungkapan informasi yang sensitive antara mahasiswa akuntansi tingkat bawah dengan akuntansi tingkat atas.
4. Perbedaan persepsi mengenai biaya-manfaat pengungkapan informasi antara mahasiswa akuntansi tingkat bawah dengan akuntansi tingkat atas.
5. Perbedaan persepsi mengenai pertanggungjawaban terhadap pengguna laporan keuangan antara mahasiswa akuntansi tingkat bawah dengan akuntansi tingkat atas.
6. Perbedaan persepsi etika menyangkut dampak skandal akuntansi dan bisnis antara mahasiswa akuntansi tingkat bawah dengan akuntansi tingkat atas.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pihak-pihak yang berkepentingan manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat memberikan informasi teoritis maupun empiris, khususnya bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Serta bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dalam memperluas wawasan mengenai pengetahuan dan menambah sumber pustaka yang ada.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Program Studi Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Program Studi Akuntansi, untuk mengetahui apakah kurikulum yang diberlakukan berbanding lurus dengan keefektivitasan terhadap kewajibannya untuk senantiasa menghasilkan lulusan Akuntansi yang beretika dan bermoral tinggi.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk senantiasa meningkatkan kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan secara wajar guna mewujudkan kondisi *Good Corporate Governance*.